



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT

B-VI-55

Surat Dari	: Ketua Tim Tata Usaha
Nomor Surat	:
Tanggal Surat	:
Perihal	Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025
Diterima Tanggal	: 13/6/25
Diterima Pukul	: 15 : 34 WIB
No Agenda	: B-VI-55

☐	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL PENUMPANG
☐	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
☐	KSD 3	SUBDIREKTORAT TERMINAL BARANG
☐	KSD 4	SUBDIREKTORAT JARINGAN DAN KEPENGUSAHAAN TRANSPORTASI JALAN
☒	KTU	KETUA TIM TATA USAHA
☐		SEKRETARIS SATKER
☐		PARA PPK
☐		SESPRI / ADC

ISI DISPOSISI

☒ Tindak Lanjuti	☐ Untuk Diketahui
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Dipelajari & Laporkan
☐ Harap Mewakili	☐ Untuk Diselsaikan & Laporkan
☐ Hadir Bersama Saya	☐ Untuk Dilaksanakan & Laporkan
☐ Siapkan Bahan	☒ Untuk Dikoordinasikan
☐ Jadwalkan	☐ Untuk Disiapkan
☐ Hadiri	☐ Sangat Segera
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



- Pantan pungen - 7

13/6 .

TONI TAULADAN, S.Si, M.T



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX
Email
Homepage

: (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
: ditjenhubdat@dephub.go.id
: <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor 242/DPTJ/VI/2025

Yth : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Dari : Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Hal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tanggal : 13 Juni 2025

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta Surat Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat Nomor PR.002/2/10/DJPD 2025 tanggal 2 Juni 2025 Hal Pengumpulan Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep dokumen *hardcopy* Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Toni Tauladan, S.Si, M.T
NIP. 19700910 199703 1 002

Yth. Pak Dir.

- Dengan terbitnya PM No. 4/2025 ttg optaker Kemenhub dan adanya perubahan pimpinan organisasi Ditjen Hubdat, maka perlu adanya penyesuaian nomenklatur dalam PK Direktorat PTJ yg sebelumnya telah ditetapkan.
- Mohon berkenan persetujuan dan dokumen Revisi I PK.
- Tks Yulia



Revisi I

Perjanjian Kinerja

**DIREKTORAT PRASARANA
TRANSPORTASI JALAN** ○ ○

2025





REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penelaah Teknis Kebijakan	27/5/25	
2.	Diperiksa	Tri Handoko Putro, S.Psi.,M.M.TR	Ketua Tim Pengelolaan Terminal Barang, Sub Direktorat Terminal Barang	28/5/25	
3.	Diperiksa	Susiani,A.Md LLAJ, ST, MT	Ketua Tim Rancang Bangun Terminal Barang, Sub Direktorat Terminal Barang, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	28/5/25	
4.	Diperiksa	Jekky Hendri, S,Sos,M.M.TR	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Terminal Barang, Sub Direktorat Terminal Barang	28/5/25	
5.	Disetujui	Riko Hanafi, ST, MT	Kepala Subdirektorat Terminal Barang	2/6/25	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra	Penelaah Teknis Kebijakan	27/5/25	
2.	Diperiksa	Junisar Cahyadi, ST	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Jaringan dan Kerjasama serta Kepengusahaan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	28/5/25	
3.	Diperiksa	Muhammad Isrofi, ST, M.Tr.AP	Ketua Tim Pengembangan Jaringan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	28/5/25	
4.	Diperiksa	Fitroh, ST, MT	Ketua Tim Tataan Jaringan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	28/5/25	
5.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SIT, M.SI	Ketua Tim Kerjasama dan Kepengusahaan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	28/5/25	
6.	Disetujui	Susanty Pertiwi, SS, M.HUM	Kepala Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan	2/6/25	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Syifa Azzaria, S.STAT	Statistisi Ahli Pertama	27/5/25	
2.	Diperiksa	Dian Ardhiya E, A.Md LLAJ, SE, M.M.Tr	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Penimbangan Kendaraan Bermotor, Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	28/5/25	
3.	Diperiksa	Hariyanto, ST	Ketua Tim Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	28/5/25	
4.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.M.Tr	Ketua Tim Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	28/5/25	
5.	Disetujui	Handjar Dwi Antoro, ATD MT	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	2/6/25	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan	27/5/25	
2.	Diperiksa	Dede Suryanto, S.T	Ketua Tim Pengelolaan Terminal Penumpang, Subdirektorat Terminal Penumpang	28/5/25	
3.	Diperiksa	Fitriyani, S.H.,M.M.TR	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Terminal Penumpang, Subdirektorat Terminal Penumpang	28/5/25	
4.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Rancang Bangun Terminal Penumpang, Subdirektorat Terminal Penumpang	28/5/25	
5.	Disetujui	Yugo Kristanto, S.Si.T, M.T.	Kepala Subdirektorat Terminal Penumpang	2/6/25	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	27/5/25	
2.	Diperiksa	Yulie Wulandari, SE	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	28/5/25	
3.	Disetujui	Toni Tauladan, S.Si., M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	2/6/25	



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.
Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

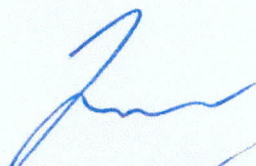
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

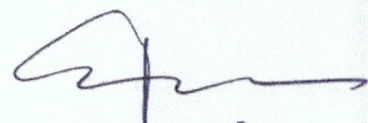
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pihak Pertama
Direktur Prasarana Transportasi Jalan


Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001


TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.
Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

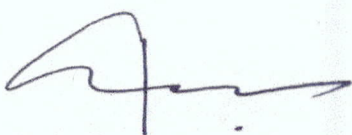
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Jakarta, 2 Juni 2025
Pihak Pertama
Direktur Prasarana Transportasi Jalan


TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20
	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51

Kegiatan

1. Penunjang teknis transportasi darat	Rp.	46.489.102.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	610.670.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	20.633.254.000,00

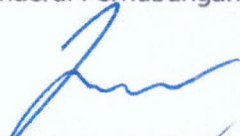
Anggaran

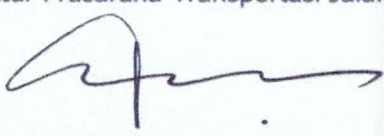
Disetujui

Jakarta, 2 Juni 2025

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Direktur Prasarana Transportasi Jalan


 Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
 NIP. 19670131 202521 1 001


 TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
 NIP. 19700910 199703 1 002

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20
	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51

Kegiatan

- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Penunjang teknis transportasi darat | Rp. | 46.489.102.000,00 |
| 2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat | Rp. | 610.670.000,00 |
| 3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. | 20.633.254.000,00 |

Anggaran

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Jakarta, 2 Juni 2025

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Lampiran I Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : 242/DPTJ/VI/2025
Tanggal : 2 Juni 2025

Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sehubungan dengan terbitnya DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2025 tanggal 02 Desember 2024 dan periode Tahun Anggaran serta Rencana Strategis periode 2025-2029 dan adanya perubahan nomenklatur sesuai PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta adanya perubahan pimpinan organisasi maka perlu ditetapkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp46.489.102.000,00 dan Program Dukungan Manajemen masih dengan pagu sebesar Rp21.243.924.000,00.

**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852	Terminal Penumpang
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077	Terminal Barang
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47	Terminal Penumpang
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60	Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60	Penimbangan Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636	Penimbangan Kendaraan Bermotor
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3	
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10	
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20	
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51	Tata Usaha dan Seluruh Subdit

**TABEL SEMULA MENJADI
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2025 (Baseline)	Realisasi 2025	Target Renstra 2025	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	SK 3 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3 Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852	0.9223			
2	SK 4 Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3 Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077	-			
3	SK 7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47	-			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025 (Baseline)	Realisasi 2025	Target Renstra 2025	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	
		IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyusunan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	-			
		IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman untuk mendukung konektivitas	%	60	-			
		IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas perimbangan sesuai SPM	%	60	-			
4	SK 9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas perimbangan untuk keselamatan	Rasio	0.636	-			
5	SK 13 Meningkatkan Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38	3,38			
		IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3	83,51			
		IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10	-			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025 (Baseline)	Realisasi 2025	Target Renstra 2025	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
		IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20	-			
6	SK 14 Meningkatkan Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51	-			



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 022.03.1.352597/2025



DS.3281-0022-8642-1157

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|----------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (022) | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (03) | Dijian Perhubungan Darat |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (352597) | DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN |
| Sebesar | : | Rp. | 67.733.026.000 (ENAM PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungs:
- 04 EKONOMI
- 04.08 TRANSPORTASI
- Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | | | | | | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | | | | Rp. | 0 |
| - PNBP TA Berjalan | | | | | | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | | | | | | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | | | | | | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | | | | | | Rp. | 0 |
| D. Pencapaian dana dilakukan melalui : | | | | | | Rp. | 0 |
| 1. KPPN JAKARTA IV | | | | | | Rp. | 0 |

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Terlampir

Jumlah Uang

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025

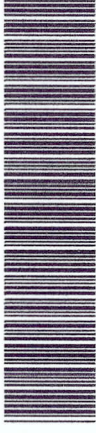


DS:3281-0022-8642-1157

Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	46.489.102.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	46.489.102.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	21.243.924.000
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	610.670.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	20.633.254.000

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
I A. INFORMASI KINERJA



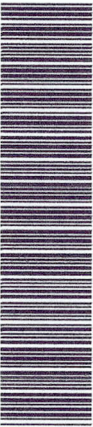
DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : I A. 1

Program	: 022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			46.489.102.000
Kegiatan	: 4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat			46.489.102.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	18,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	28.551.000.000
Rincian Output	: 01 ABF.001	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	18,00	Rekomendasi Kebijakan	28.551.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32,00	Laporan, Rekomendasi	12.938.102.000
Rincian Output	: 01 FAE.923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32,00	Laporan	12.938.102.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.000.000.000
Rincian Output	: 01 PBF.209	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)	1,00	Kajian	2.500.000.000
	02 PBF.210	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Belan Subing) (Prioritas Nasional)	1,00	Kajian	2.500.000.000
Program	: 022.03.WA	Program Dukungan Manajemen			21.243.924.000
Kegiatan	: 4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat			610.670.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 4596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6,00	Unit, m2, Paket	610.670.000
Rincian Output	: 01 EBB.906	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	6,00	unit	610.670.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

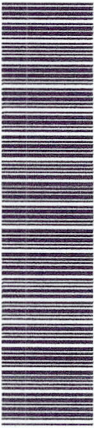
Halaman : I A. 2
20.633.254.000

Kegiatan	: 4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat		
Indikator Kinerja Kegiatan	:			
Klasifikasi Rincian Output	2	: 4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
Rincian Output	:	01	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit Layanan
				5.547.254.000
				5.547.254.000
Klasifikasi Rincian Output	3	: 4670.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	
Rincian Output	:	01	EBD.909 Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	3,00 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi Laporan
				15.086.000.000
				15.086.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttid.
Irijen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
IB. SUMBER DANA



DS:3261-0022-8642-1157

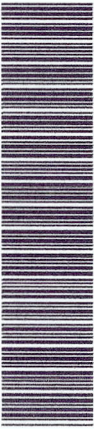
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Salter : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

1. Anggaran Tahun 2025		Rp.	67.733.026.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	0	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni		Rp.	49.639.364.000		(2) RPLN		US\$		0	Rp.	0		0
2. PNB		Rp.			(1) Valuta Asing		US\$		0	Rp.	0		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		(2) RHLN		US\$		0	Rp.	0		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR		0				
5. Hibah Langsung		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR		0				
6. SBSN PBS		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR		0				
2. Rincian Pinjaman / Hibah :					f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR		0				

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING			
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3281-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	-	50.274.796	17.458.230	-	-	67.733.026		
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	-	29.641.542	16.847.560	-	-	46.489.102		
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	-	29.641.542	16.847.560	-	-	46.489.102		
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	11.703.440	16.847.560	-	-	28.551.000	01 . 51	
01 RM		-	8.700.000	3.700.000	-	-	12.400.000	133@	
04 PNBP		-	3.003.440	13.147.560	-	-	16.151.000	133@	
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	12.938.102	-	-	-	12.938.102	01 . 51	
01 RM		-	10.995.440	-	-	-	10.995.440	133@	
04 PNBP		-	1.942.662	-	-	-	1.942.662	133@	
4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 51	
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	133@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Dijen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	-	20.633.254	610.670	-	-	21.243.924		
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	-	-	610.670	-	-	610.670		
4596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	610.670	-	-	610.670	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	-	-	-	-		
01 RM		-	-	610.670	-	-	610.670	133@	
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	-	20.633.254	-	-	-	20.633.254		
4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	5.547.254	-	-	-	5.547.254	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	-	-	-	-		
01 RM		-	5.547.254	-	-	-	5.547.254	133@	
4670.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	15.086.000	-	-	-	15.086.000	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	-	-	-	-		
01 RM		-	15.086.000	-	-	-	15.086.000	133@	
		-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH	-	50.274.796	17.458.230	-	-	67.733.026		

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttid.
Irfen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

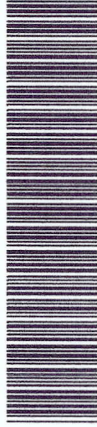
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN														
		RENCANA PENARIKAN DANA	677.922	662.043	849.786	1.002.107	759.623	674.681	625.845	611.907	583.729	688.539	724.769	59.872.075	67.733.026	
		BELANJA BARANG	677.922	662.043	849.786	1.002.107	759.623	674.681	625.845	611.907	583.729	688.539	724.769	42.413.845	50.274.796	
022.03.GA.4640		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.458.230	17.458.230	
		Penunjang Teknis Transportasi Darat	145.433	400.384	612.967	294.495	328.252	314.372	270.536	255.598	228.420	311.560	381.948	42.944.438	46.489.102	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	145.433	400.384	612.967	294.495	328.252	314.372	270.536	255.598	228.420	311.560	381.948	26.096.878	29.641.542	
022.03.WA.4596		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.847.580	16.847.580	
		Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.670	610.670	
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.670	610.670	
022.03.WA.4670		Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	532.490	261.659	236.819	707.612	431.371	360.309	355.309	355.309	355.309	376.979	343.121	16.316.967	20.633.254	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	532.490	261.659	236.819	707.612	431.371	360.309	355.309	355.309	355.309	376.979	343.121	16.316.967	20.633.254	

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

td.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
IV A. B L O K I R



DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Sakter : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : IV.A. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan		Tidak Dapat Dicairkan
	52 Belanja Barang		Efisiensi Anggaran
	53 Belanja Modal		
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	521211	Belanja Bahan(RM)
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat		Tidak Dapat Dicairkan
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan		
	Efisiensi Anggaran		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan		
	Efisiensi Anggaran		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
536111	Belanja Modal Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan		
	Efisiensi Anggaran		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
536111	Belanja Modal Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan		
	Efisiensi Anggaran		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan		
	Efisiensi Anggaran		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
521119	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan		
	Efisiensi Anggaran		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522141	Belanja Sewa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan		
	Efisiensi Anggaran		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		

75.000

611.275

201.790

90.705

1.644.425

191.331

15.000

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any areas for improvement.

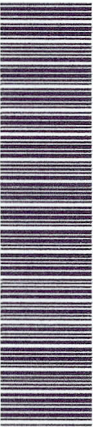
DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga	: [022]	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: [03]	Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi	: [01]	DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker	: [352597]	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	432.819	Rp.
Disposisi: 522151	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	22.200	Rp.
Disposisi: 522191	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Jasa Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	500.000	Rp.
Disposisi: 524111	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	2.705.732	Rp.
Disposisi: 524111	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	508.005	Rp.
Disposisi: 524114	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	386.475	Rp.
Disposisi: 524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	1.579.273	Rp.
Disposisi: 524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
IV A. B L O K I R



DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Salter : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran		150.000 Rp.
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran		250.000 Rp.
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
4670.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
522191	Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan		14.271.000 Rp.
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
IV B. C A T A N



DS:3261-0022-8642-1157

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Salter : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433